



Manajemen Mitigasi Bencana Kota Palu Palu City Disaster Mitigation Management

Widarti Gularsih Sukino; Muhammad Ahsan Samad*; Nasir Mangngasing; Abdul Rivai

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tadulako Palu. Indonesia

ARTIKEL INFO

* Corresponding author;
ahsansamad@untad.ac.id

Kata Kunci:

bencana;
kesiapsiagaan;
manajemen;

disaster;
preparedness;
management;

ABSTRAK

Kota Palu merupakan salah satu kota dengan tingkat rawan bencana yang tinggi. Tidak hanya menimbulkan gempa bumi, namun juga tsunami dan fenomena likuifaksi. Salah satu cara untuk mengurangi dampak bencana adalah dengan melakukan mitigasi bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Palu merupakan badan yang bertanggung jawab untuk menangani bencana yang terjadi di kota Palu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen mitigasi bencana pada kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Palu serta faktor pendorong dan penghambat manajemen dalam mitigasi bencana. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Indikator yang digunakan pada penelitian ini adalah fungsi manajemen dari Luther Gulick yang di kenal POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting and Budgeting). Selain itu juga dilihat dari faktor pendorong dan penghambat manajemen organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Planning belum maksimal, karena masih terdapat program atau kegiatan yang belum mencapai target. Directing belum sepenuhnya memahami Garis komando, serta masih terdapat ego sektoral sehingga proses penanganan bencana menjadi lambat. Budgeting masih kurang, dimana biaya di padatkan dalam artian melakukan 2 kegiatan dengan satu dana. Faktor yang menghambat manajemen adalah kurangnya SDM yang handal, kekurangan sarana dan prasarana, keterbatasan dana, sedangkan banyaknya dukungan dari pihak luar menjadi pendorong.

Palu City is a city with a high level of disaster prone. Not only caused an earthquake, but also a tsunami and liquefaction phenomenon. One way to reduce the impact of disasters is to do disaster mitigation. The Palu City Regional Disaster Management Agency is the body responsible for handling disasters in the city of Palu. The purpose of this study is to find out how disaster mitigation management is at the Palu City Regional Disaster Management Agency office as well as management driving and inhibiting factors in disaster mitigation. The research method used is descriptive method with fenomenology approach. The results of the study show that Planning has not been maximized, because there are still programs or activities that have not reached the target. Directing does not fully understand the Command Line, and there are still sectoral egos so that the process of disaster management is slow. Budgeting is still lacking, where costs are tightened in terms of doing 2 activities with one fund. Factors that hamper management are the lack of reliable human resources, lack of facilities and infrastructure, limited funds, while the large amount of support from outside parties becomes a driver.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di Garis Katulistiwa dan dikelilingi oleh Cincin Api. Cincin Api merupakan garis pertemuan Lempeng Benua Asia dengan Lempeng Samudra India, yang terletak disepanjang garis Pantai Selatan Indonesia. Juga garis pertemuan antara Lempeng Pasifik dan Lempeng Asia yang terletak disepanjang Kepulauan Maluku. Akibat situasi geologis ini, di Indonesia juga banyak terdapat sesar dan gunung berapi. Oleh karena itu di Indonesia banyak terdapat Bencana Alam yang terkait dengan Gempa Tektonik dan Letusan Gunung Berapi. (Disaster, Management, Suprayitno, Asih, & Soemitro, 2019)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, salah satunya perlindungan terhadap bencana. Penanggulangan dan pengurangan risiko bencana merupakan rencana pemerintah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019) yang dilandasi dari kenyataan bahwa Indonesia terpapar oleh berbagai fenomena alam yang berpotensi menimbulkan resiko bencana. Hal ini menjadikan Indonesia dikenal sebagai sebagai "supermarket bencana" meski dianggap cukup baik.

Kota Palu, ibukota Provinsi Sulawesi Tengah tercatat sebagai daerah rawan gempa karena memiliki aktivitas tektonik tertinggi di Indonesia. Palsalnya, di Kota Palu terdapat patahan kerak Bumi (sesar) berdimensi cukup besar yang dikenal dengan nama sesar Palu- Koro. Sesar Palu-Koro memanjang sekitar 500 kilometer mulai dari Selat Makassar sampai Pantai Utara Teluk Bone. Di Kota Palu, sesar melintas dari Teluk Palu masuk ke wilayah daratan, memotong jantung kota sampai ke Sungai Lariang di Lembah Pipikoro. (Rahman, 2018)(Purnama, 2019) Daerah Sulawesi adalah salah satu daerah yang rawan bencana gempa bumi. (Nursiah, L. 2017)(Wati, Tawulo, Prasetya, & Rezal, 2019). Pada tahun 2018 silam, terjadi pergerakan lempeng di daerah yang berbeda di Indonesia, menyebabkan beberapa kota mengalami gempa bumi dengan kekuatan yang besar. Salah satunya terjadi di Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang juga merupakan salah satu kota dengan tingkat rawan bencana yang tinggi. Tidak hanya menimbulkan gempa bumi, namun juga tsunami dan fenomena likuifaksi yang sangat jarang terjadi juga menimpa Kota Palu.(Handoyo & Wonoseputro, 2019)

Pada tanggal 28 September 2018 peristiwa gempa bumi berkekuatan 7,4 SR diikuti dengan tsunami yang melanda pantai barat Pulau Sulawesi. Pusat gempa berada di 26 km utara Kabupaten Donggala dan 80 km barat laut Kota Palu dengan kedalaman 10 km. Guncangan gempa bumi dirasakan di Kabupaten Donggala, Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Sigi, Kabupaten Poso, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Mamuju bahkan hingga Kota Samarinda, Kota Balikpapan, dan Kota Makassar. Gempa bumi memicu tsunami hingga ketinggian 5 meter di Kota Palu. Menurut BNPB, dampak bencana gempa bumi dan tsunami tercatat 2.256 orang meninggal dunia. Sebarannya di Kota Palu 1.703 orang, Donggala 171 orang, Sigi 366 orang, Parigi Moutong 15 orang dan Pasangkayu 1 orang. Dari segi infrastruktur, banyak bangunan yang hancur akibat gempa bumi dan tsunami. Kerusakan meliputi 68.451 unit rumah, 327 unit tempat ibadah, 265 unit sekolah, perkantoran 78 unit, toko 362 unit, jalan 168 titik retak, jembatan 7 unit dan sebagainya. Kerusakan dan kerugian dari bencana ini mencapai 13,82 trilyun rupiah.(Purnama, 2019)

Bencana gempabumi Palu-Donggala pada tanggal 28 September 2018 telah memicu bencana lainnya yaitu longsor, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah. Ada 4 kabupaten/kota yang terdampak langsung oleh bencana tersebut yaitu Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Parigi Moutong. Jumlah kerusakan dan korban jiwa yang paling besar di Kota Palu akibat gempabumi dan tsunami 28 September 2018, menunjukkan bahwa mitigasi bencana di Kota Palu, merupakan hal yang perlu serius untuk dikaji, karena Kota Palu merupakan ibukota Propinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah penduduk dan pembangunan paling besar dibanding kota/kabupaten lainnya.(Kurniawan et al., 2019). Berdasarkan data-data tersebut dengan tingginya jumlah korban jiwa dan kerugian harta benda menjadi indikasi bahwa masih lemahnya manajemen bencana, baik sebelum bencana, ketika terjadi bencana maupun setelah terjadinya bencana di Indonesia. Artinya kita perlu belajar lebih banyak lagi tentang manajemen bencana berkaca dari rentetan peristiwa bencana alam yang terjadi di Indonesia. (Hasrul Hadi, Sri Agustina, 2019)

Manajemen bencana (disaster managemen) dapat diartikan sebagai rangkaian fase atau tahapan penanggulangan bencana yang meliputi 1) mitigasi (mitigation) merupakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak buruk dari suatu ancaman. Misalnya penataan kembali lahan desa agar terjadinya banjir tidak menimbulkan kerugian besar;

2) kesiap-siagaan (*preparedness*) yaitu persiapan rencana untuk bertindak ketika terjadi (kemungkinan akan terjadi) bencana. Perencanaan terdiri dari perkiraan terhadap kebutuhan-kebutuhan dalam keadaan darurat dan identifikasi atas sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perencanaan ini dapat mengurangi dampak buruk dari suatu ancaman; tanggap darurat (*emergency respons*) yaitu upaya untuk menyelamatkan jiwa dan melindungi harta serta menangani gangguan kerusakan dan dampak lain suatu bencana. (Hasrul Hadi, Sri Agustina, 2019). Kejadian bencana alam tahun 2018 di Palu, Sigi dan Donggala menjadi bukti bahwa ketiga kota tersebut harus memantapkan kegiatan mitigasi bencana di segala aspek. (Kasman, 2019).

Carter membagi ke dalam dua metode, yakni mitigasi fisik dan mitigasi nonfisik. Mitigasi fisik (*Structure Mitigation*) merupakan keseluruhan upaya yang bertujuan meminimalisir risiko bencana dan dampaknya melalui pembangunan infrastruktur. Mitigasi nonfisik (*Non Structure Mitigation*) merupakan keseluruhan upaya yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana dan dampaknya dengan cara meningkatkan kemampuan baik fisik maupun teknik melalui kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana. (Sosial, 2016). Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang antara lain mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Adapun Peraturan Daerah (Perda) No 02 Tahun 2009 tentang tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu. BPBD, merupakan lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik provinsi maupun Kabupaten /Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

METODE

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi diterapkan melalui proses menganalisis konsep dan wacana serta fakta otentik yang terkandung di lapangan. Konsep yang dimaksud adalah konsep manajemen mitigasi bencana pada pemerintah kota Palu. Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer strategi pemerintah dalam menangani korban bencana, data digunakan

dalam bentuk dokumen pendukung dan hasil wawancara lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama dengan mengumpulkan data primer dalam bentuk survei awal tentang manajemen bencana alam di Palu. Kemudian pada tahap selanjutnya dilakukan analisis dan pengumpulan dokumen terkait tata kelola serta kebijakan mitigasi bencana. Kemudian langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari hasil analisis yang diperoleh.

HASIL DAN DISKUSI

Secara geografis, Kota Palu terletak antara 00,36" – 00,56" Lintang Selatan dan 1190,45"-1210,1" Bujur Timur, tepat berada di bawah garis khatulistiwa dengan ketinggian 0 - 700 meter dari permukaan laut. Kota Palu terdiri dari 8 Kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Palu Barat: Kelurahan Ujuna, Baru, Siranindi, Kamonji, Balaroa dan Lere.
2. Kecamatan Tatanga: Kelurahan Duyu, Pengawu, Palupi, Tawanjuka, Boyaoge dan Nunu.
3. Kecamatan Ulujadi: Kelurahan Donggala Kodi, Kabonena, Silae, Tipo, Buluri dan Watusampu.
4. Kecamatan Palu Selatan: Kelurahan Birobuli Selatan, Petobo, Birobuli Utara, Tatura utara, dan Tatura Selatan.
5. Kecamatan Palu Timur: Besusu Barat, Besusu Tengah, Besusu Timur, Lolu Utara dan Lolu Selatan.
6. Kecamatan Mantikulore; Kelurahan Talise, Tanamodidi, Lasoani, Kawatuna, Poboya, Tondo, Layana Indah dan Talise
7. Kecamatan Palu Utara; Kelurahan Mamboro, Taipa, Kayumaleo Pajeko, Kayumaleo Ngapa, dan Mamboro Barat.
8. Kecamatan Tawaeli: Kelurahan Panau, Lambara, Baiya, Pantoloan dan Pantoloan Boya (BPS, 2017), (Kurniawan et al., 2019)

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mengamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam hal ini perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa : pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 membentuk

Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, serta mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah daerah kota Palu melalui Walikota Palu dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat daerah kota Palu menetapkan Peraturan daerah kota Palu Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu, yang ditetapkan pada tanggal 24 April 2009, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2009 Walikota Palu telah melantik pejabat Eselon II.b, Eselon III.b dan Eselon IV.a Badan Penanggulangan Bencana daerah kota Palu, yang mana Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana daerah kota Palu yang ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2009.

Dengan demikian nampak bahwa Badan Penanggulangan Bencana daerah kota Palu yang merupakan bagian dari Satuan Kerja Perangkat daerah kota Palu Memiliki peran strategis dan tanggung jawab dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di daerah kota Palu. Berdasarkan hasil dokumen dan studi lapangan bahwa dalam melakukan mitigasi bencana di kota Palu diperlukan suatu tindakan yang teratur dan sistematis dalam mitigasi bencana, maka untuk menyelesaikan masalah tersebut di butuhkan suatu manajemen sehingga proses mitigasi bencana dapat terlaksana dengan baik dan benar. Dalam melaksanakan manajemen mitigasi bencana hal-hal yang perlu di perhatikan ialah : Perencanaan, Pengorganisasian, Penyusunan pegawai, Pengarahan, Koordinasi, pelaporan dan penganggaran. Untuk mengetahui penerapan indikator manajemen mitigasi bencana maka dilakukan penelitian dan wawancara sebagai berikut :

Perencanaan

Perencanaannya mengacu kepada rencana pembangunan jangka panjang RPJMD karena lini komando daerah masuklah namanya RPJMD. Turunan dari RPJPD, RPJMD itu 5 Tahun RPKP per 20-25 tahun. Perencanaan di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Palu, dibuat atas dasar tujuan dan sasaran yaitu masyarakat Pertama melaksanakan pelatihan-pelatihan simulasi, kemudian membentuk kelurahan tangguh bencana

ada beberapa kelurahan yang sudah dilaksanakan, termasuk pemasangan rambu evakuasi kemudian titik kumpul. Adapun belum maksimalnya program disebabkan karena dalam hal rencana kontijensi bahwasanya terkendala di anggaran Faktor perencanaan salah satunya adalah anggaran. memperbaharui rencana kontijensi butuh biaya yang mahal sampai pada masa akhir tidak ada keberlanjutan. Anggaran itu besar untuk pembuatan atau pembaharuan kembali rencana kontijensi. Peringatan dini, di kota Palu sangat-sangat kurang terkait untuk tsunami. Serta mitigasi dalam hal infrastruktur masih perlu di tingkatkan.”

Perencanaan Peringatan dini Meteorologi melihat dari data satelit BMKG selanjutnya melihat dari beberapa metode seperti angin, daerah bagaimana cuaca sebelumnya. Kendala di bagian metode, hanya mengandalkan satelit dan program saja. Dan untuk peringatan dini bergantung pada radar.

Perencanaan peringatan dini geofisika untuk gempa maupun tsunami di kantor Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika kota Palu belum sepenuhnya tepat sasaran maupun tujuan dikarenakan masih adanya kendala seperti kendala terbesar adalah yang pertama yaitu dana, karena peringatan dini itu adalah sebuah sistem dan peralatan alat perekam misalnya dalam hal ini sensor pengamat gempanya lumayan mahal selected sensornya lalu sistim komunikasinya mahal. Sirine Tsunami/INETWS Indonesia early tsunami warning system hanya ada satu di kota Palu dikarenakan harganya mencapai 1 Miliar per Unitnya.

Pengorganisasian

Pengorganisasian pada kantor BPBD kota Palu, tujuan dan sasaran ialah masyarakat pelaksanaan program kerja dari BPBD tidak jalan sendiri, banyak organisasi perangkat daerah (OPD) internal kota Palu yang menjadi mitra. Yaitu, Badan pemerintah daerah (BAPEDA) mitra dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah OPD yang teknis BPBD koordinasi yang lebih di tekankan eksekusi dan teknisnya dinas terkait. Seperti dinas pekerjaan umum (PU), dinas kebakaran (Damkar), serta Dinas Sosial dll. juga bermitra dengan lembaga swadaya masyarakat LSM-LSM lokal terkait kebencanaan. selalu melakukan rapat koordinasi lintas sektoral melibatkan OPD lain OPD teknis yang terkait tentang kebencanaan.

Penyusunan Pegawai

Penempatan pegawai pada kantor BPBD kota Palu sudah sesuai dengan tupoksinya masing-masing dan ada pembinaan sebelumnya dari BPBD baik untuk BPBD maupun bagi relawan yang dibentuk di

kelurahan tangguh bencana. Dan sumber daya manusia terbilang sumber dayanya tidak kuat. Karena PNS di kantor BPBD ini hanya 33, tenaga honorer 27 total 60. Sedangkan harus menangani 90.000an masyarakat kota palu. Pegawai Harus terlatih semua, bagaimana terlatih menyelamatkan masyarakat. Sedangkan untuk desa tangguh bencana itu dari masyarakat yang nantinya menjadi relawan di desanya. Dan dilakukan bimbingan oleh bidang pencegahan dan kesiapsiagaan BPBD kota Palu.

Pengarahan

Aspek komando Badan Penanggulangan Bencana daerah kota Palu yaitu, Departemen dalam negeri dasarnya Undang-undang, komandonya BPBD maka dasarnya adalah keputusan presiden, karena badan setingkat menteri. Komando berada di sekertaris daerah badan pelaksana melaksanakan komandonya. Kepala pelaksana BPBD kota Palu eselon 2B, kepala Dinas PU 2B kepala dinas keuangan eselon 2B, tataruang eselon 2B. Yang bisa memerintah itu yang setingkat diatasnya harus sekertaris daerah yang memerintah. Sistem komando untuk peringatan dini dengan mengarahkan satu sama lain.

Koordinasi

BPBD kota Palu melakukan koordinasi antar lintas pemerintah dan non pemerintah yaitu, kepolisian, TNI, Basarnas, Dinas sosial, Dinas kesehatan dll. OPD-OPD semua mempunyai tugas dengan fungsi teknisnya. Ada NGO-NGO sifatnya koordinatif mitra kerja antara pemerintah dan non pemerintah. Selalu koordinasi melalui rapat-rapat, bimbingan teknis melalui program dengan cara mengundang pihak terkait baik secara formal maupun informal. BMKG kota Palu dengan melakukan koordinasi dengan jejaring publik, jejaring terkait kemanan seperti tentara dan kepolisian serta gubernur dan walikota. Koordinasi tersebut dilakukan melalui saling menghubungi pihak terkait menggunakan media yang ada telephon, sms, email, radio, tv, melalui jejaring media sosial.

Pelaporan

Pelaporan yang ada pada kantor BPBD kota Palu dalam kondisi normal, BPBD kota palu mempunyai laporan yang di sebut dengan tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran (TEPRA) ada laporan rutin setiap bulan ada evaluasi setiap bulan tetapi jika dalam kondisi bencana mempunyai laporan-laporan khusus kebencanaan. Sistem pelaporan ada di (pusdalops) pusat pengendalian operasi sistem kerjanya 1x24 jam. Pusdalops setiap bulan dibuatkan laporannya, ada ataupun tidak ada bencana, dilaporkan setiap bulan rutin, cuaca, angin, curah hujan, kemarau, suhu. Untuk kejadian gempa bumi

itu dibuatkan laporan per-kejadian. Kemudian terkait mingguan, membuat rekapitulasi mingguan. Segera merilis namun belum di keluarkan ke publik masih di bagi ke pusat. Pusat yang justifikasi setiap 3 hari. Jika di cuaca tiap-tiap jam melapor karena pengamatannya 1x24 jam dikali 365 jadi setiap jam mengirim data dikirim ke Jakarta dan di pertukarkan internasional, ke Badan Meteorologi Dunia.

Penganggaran

Mekanismenya pertama mengusulkan rancangan tahunan ke tim anggaran pemerintah daerah (TAPB) lalu setelah itu, dimasukan RAPBD setelah itu ke DPR disahkan menjadi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Dalam hal pembiayaannya, secara APBD akan dimasukan ke rancangan APBD akan disahkan DPR, ada yang 5 tahun ada yang 20 tahun ada yang tahunan itu di sebut dengan (RKPD) rencana kerja pemerintah daerah. Desa tangguh bencana anggaran diajukan sekian tahun mengajukan anggaran ke pemerintah kota. Tergantung kemampuan daerah. BMKG kota Palu, sumber dananya adalah dari anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) dari pusat. Kemudian dalam penganggarannya setiap BMKG daerah mengusulkan perwilayah. Disesuaikan dengan kearifan lokal disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Namun implementasinya anggaran untuk pengurangan resiko bencana baik untuk mitigasi bencana maupun peringatan dini masih terbilang kurang dalam pendaannya.

Faktor Pendorong dalam Manajemen Mitigasi Bencana

Banyaknya dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak luar BPBD, seperti organisasi masyarakat, komunitas masyarakat, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, hingga relawan-relawan yang terbentuk dari desa tangguh bencana.

Faktor Penghambat dalam Manajemen Mitigasi Bencana

1. Minimnya Sumber Daya Manusia

Secara kuantitas, jumlah pegawai BPBD kota Palu dan BMKG kota Palu yang bekerja masih sangat kurang. Sehingga terjadi rangkap tugas dan pekerjaan. Untuk meningkatkan manajemen mitigasi bencana yang baik harus memiliki SDM yang memadai sebab seorang yang dipercayakan oleh atasannya harus melaksanakan tugasnya dengan baik. Sumber daya manusia dari keterampilan dan komitmen dalam mitigasi bencana di BPBD kota Palu belum maksimal di

lakukan, dimana keterampilan dan komitmen dari petugas perlu di tingkatkan lagi agar bisa mendukung manajemen ke arah yang lebih baik.

2. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Minimnya sarana prasarana evakuasi dan pertolongan dalam penanggulangan bencana dalam rangka melakukan pencegahan, pengurangan resiko bencana, mitigasi bencana, pertolongan dan evakuasi dan pemulihan darurat terjadi pada saat bencana serta rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana, diperlukan peralatan yang memadai dan sesuai dengan kejadian bencananya. Selama ini BPBD memiliki keterbatasan dalam sarana prasarana hingga saat ini masih memerlukan diantaranya vertical rescue, water rescue, alat berat lainnya. Belum meratanya sistem peringatan dini early warning system (EWS) wilayah kota Palu.

3. Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran dalam mendukung kegiatan atau program di setiap tahapan bencana. Penganggaran khususnya untuk pengurangan resiko bencana masih sangat minim, di karenakan bencana masih di anggap belum prioritas dan jangka panjang, Sedangkan dalam NAWACITA ke Tujuh bahwa penganggaran untuk bencana di utamakan. Namun implementasinya masih kurang. Begitu pula untuk pendanaan peringatan dini di BMKG kota Palu masih minim dana.

KESIMPULAN

Faktor utama dalam perencanaan kantor BPBD dan BMKG dalam mitigasi bencana kota Palu yaitu, terkait keselamatan manusia/masyarakat sedangkan kesulitan yang di hadapi dalam melaksanakan perencanaan yaitu, minimnya dana, sarana prasarana masih kurang dan SDM yang belum memadai, serta kurangnya respon masyarakat pada saat simulasi bencana yang menjadi kendala dalam menerapkan perencanaan. Dimensi yang ikut mempengaruhi proses perencanaan, yaitu: kebijakan, pengambilan keputusan, kreatifitas, dan pengaruh eksternal.

Kedua dalam pengelompokan pekerjaan sudah sesuai dengan tupoksinya terhadap wewenang yang di berikan. Adapun yang menjadi kendala pada ketersediaan organisasi tersebut dalam menyediakan hal yang di butuhkan serta sistem komando, maupun waktu dan koordinasi. Adapun kendala dalam proses penetapan yang akan dilakukan sebaiknya bisa menjadi alat pertimbangan dalam aktivitas yang akan dilakukan nantinya sehingga dalam proses organisasi berjalan dengan baik dan efektif. Oleh sebab itu

implementasi pengorganisasian, seorang pimpinan menentukan apa pekerjaan (jenis/sifat pekerjaan), siapa yang akan melakukan apa, unit-unit kerjanya, bagaimana pekerjaan dilakukan, kapan dan dimana pekerjaan dilakukan, fasilitas serta biaya kegiatan.

Ketiga bahwa Proses penyusunan pegawai telah sesuai dengan tupoksinya masing-masing, karena telah mendapatkan pembinaan, namun dalam perekrutan tenaga kerja terdapat keterbatasan anggaran sehingga sumber daya manusia yang ada masih terbilang kurang, sedangkan beban kerjanya lebih besar dari pada jumlah SDM. Oleh sebab itu, pemilihan dan penempatan yang sesuai dengan kualifikasi akan berdampak baik dalam menentukan keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi.

Keempat bahwa dalam pemberian komando masih adanya kendala seperti belum sepenuhnya memahami garis komando dan terdapat ego sektoral dapat menjadi penghambat dalam berjalannya sebuah program. Sehingga masih perlunya keseriusan amanah dalam hal jabatan yang di emban dan jangan ada unsur ego sektoral saling membantu dapat mencapai tujuan yang maksimal. Karena kesamaran perintah dan saran yang diberikan oleh manajer kepada bawahan akan memberikan dampak negatif dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah bawahan ragu melaksanakan kerja sehingga penyelesaian pekerjaan akan mengalami keterlambatan.

Kelima bahwa koordinasi dalam melaksanakan komitmennya beberapa dinas maupun OPD-OPD masih kurang serta ketersediaan pihak tersebut dalam menjalankan program menjadi kendala dalam berjalannya proses koordinasi. Berdasarkan hasil analisis peneliti, kejadian ini akibat dari kurang perhatian dari berbagai pihak pemerintah. Koordinasi sangat penting dalam suatu organisasi, agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan. Serta untuk mencegah terjadinya kekacauan percekocokan pekerjaan. Pelaporan 1x24 jam yang dilakukan oleh pusdalops. BPBD kota Palu mempunyai laporan yang di sebut dengan (TEPRA) tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran, ada laporan rutin setiap bulan ada evaluasi setiap bulan tetapi jika dalam kondisi bencana mempunyai laporan-laporan khusus kebencanaan. Sedangkan kantor BMKG kota Palu terdapat 3 UPT dimana dalam kejadian kegempaan terdapat laporan per-kejadian, sedangkan untuk masalah di cuaca tiap-tiap jam melapor karena pengamatannya 1x24 jam. Peneliti menganalisis bahwa data dan waktu menjadi kendala dalam proses pelaporan sehingga akan mengakibatkan laporan menjadi kurang maksimal.

Anggaran merupakan hal yang sangat penting dalam suatu program, selanjutnya anggaran akan berpengaruh juga terhadap keberhasilan dari program tersebut. Sama halnya dengan program mitigasi bencana maupun peringatan dini, anggaran yang di berikan di rasa belum mencukupi untuk proses pengurangan resiko bencana. Pada kenyataannya masih kurang, banyak fasilitas seperti rambu-rambu evakuasi, jalur evakuasi serta peringatan dini di kota Palu masih minim di akibatkan anggaran untuk program tersebut masih terbilang sangat kurang. Faktor yang menjadi pendorong yaitu banyaknya dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak luar BPBD, seperti organisasi masyarakat, komunitas masyarakat, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, hingga relawan-relawan yang terbentuk dari desa tangguh bencana. Adapun faktor penghambat dalam pencapaian tujuan manajemen mitigasi bencana

PENGAKUAN

Terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam hal penyelesaian paper ini, kepada aparat pemerintah Kota Palu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah serta Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik diucapkan banyak terima kasih. Juga kepada para team peneliti, dosen dan mahasiswa, terimakasih atas kerjasamanya.

REFERENSI

- Aitsi-selmi, A., Egawa, S., & Sasaki, H. (2015). The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction : Renewing the Global Commitment to People ' s Resilience , Health , and Well-being. *International Journal of Disaster Risk Science*, 6(2), 164–176. <https://doi.org/10.1007/s13753-015-0050-9>
- Cordero-reyes, A. M., Palacios, I., Ramia, D., West, R., Valencia, M., Ramia, N., ... Grunauer, M. (2016). Natural disaster management : experience of an academic institution after a 7 . 8 magnitude earthquake in Ecuador. *Public Health*, 144, 134– 141. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2016.12.003>
- Daswati, D., Samad, M. A., & Wekke, I. S. (2019). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Integrated Community Shelter Pasca Bencana Di Kota Palu Collaborative Governance in the management of Integrated Community Shelters post disaster (ICS) in the City of Palu.
- Doberstein, C. (2017). Designing Collaborative Governance Decision- Making in Search of

a ' Collaborative Advantage ' COLLABORATIVE DECISION-MAKING IN SEARCH OF A ' COLLABORATIVE ADVANTAGE .' *Public Management Review*, 18(6), 819–841. <https://doi.org/10.1080/14719037.2015.1045019>

- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2011). An Integrative Framework for Collaborative Governance, (June 2009), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Frederickson, H. G. (n.d.). *The Public Administration Theory Primer*. (H. G. Frederickson;, K. B. Smith;

- Christopher W. Larimer, & Michael J. Licari, Eds.) (second edi). University of Kansas: Library of Congress Cataloging. Gempabumi Sulteng. (n.d.).
- K, A. C., & Elsevier, P. H. (2017). This is a repository copy of The 2015 Nepal earthquake disaster : lessons learned one year on . White Rose Research Online URL for this paper : Version : Accepted Version Proceedings Paper : authors) (2017) The 2015 Nepal earthquake disaster : lessons learned one year on . In : Authors : The School of Health and Related Research , the University of Sheffield , UK.
- Making local partnerships work for disaster risk reduction - Humanitarian Practice Network. (n.d.).
- Newig, J., Challies, E., Jager, N. W., & Kochskaemper, E. (2018). The Environmental Performance of Participatory and Collaborative Governance : A Framework of Causal Mechanisms, 46(2), 269–297. <https://doi.org/10.1111/psj.12209>
- Rajindra, R., Suardi, I., & Sabara, Z. (2019). Diversity, Resilience , and Tragedy : Three Disasters in Palu of Indonesia, 5(2), 1592–1607.
- Rusydi, M., Efendi, R., Sandra, & Rahmawati. (2018). Earthquake Hazard Analysis Use Vs30 Data in Palu. *Journal of Physics: Conference Series*, 979(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/979/1/012054>
- Samad, M. A., & Hardi, R. (2019). Kepemimpinan Transformasional Walikota Makassar (2014- 2019) pada Program Makassar Tidak Rantasa (MTR), 5(1), 46–50.
- Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 - 2030 1. (2015).
- Summary, R. (2017). Collaborative environmental governance: Achieving collective action in social- ecological systems, 1114(August). <https://doi.org/10.1126/science.aan1114>
- Technical, E. E. A. (2010). *Mapping the impacts of natural hazards and technological accidents in Europe An overview of the last decade*. <https://doi.org/10.2800/62638>
- Wekke, I. S., Rajindra, R., Pushpalal, D., Samad, M. A., Yani, A., Umam, R., & Presented, P. (n.d.). Educational Institution on Responding Disasters in Palu of Indonesia.